

## Determinasi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2021-2023

Narika Selvy Oktavia<sup>1\*</sup>, Sugiarti<sup>2</sup>, Faiz Rahman Siddiq<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Setia Budi Surakarta

\* E-mail Korespondensi: narikaoktavia@gmail.com

### Information Article

*History Article*

*Submission: 05-06-2026*

*Revision: 07-06-2026*

*Published: 10-06-2026*

**DOI Article:**

**10.24905/mlt.v6i2.433**

### A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kekayaan daerah, ukuran aset, tingkat ketergantungan, jumlah SKPD, dan jumlah temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia periode 2021–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas dan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah serta laporan hasil pemeriksaan. Sampel penelitian mencakup seluruh pemerintah provinsi di Indonesia dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran aset berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, sedangkan kekayaan daerah dan jumlah SKPD berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu, tingkat ketergantungan dan jumlah temuan audit tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan variabel yang terbatas serta periode penelitian yang relatif singkat. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

**Kata Kunci:** Tingkat Pengungkapan, Kekayaan Daerah, Ukuran Aset, Tingkat Ketergantungan, Jumlah SKPD, Jumlah Temuan Audit

### A B S T R A C T

*This study aims to analyze the influence of regional wealth, asset size, level of independence, number of regional government agencies (SKPD), and number of audit findings on the level of disclosure of provincial government financial reports in Indonesia for the 2021–2023 period. This study uses a quantitative approach with a causality design and utilizes secondary data in the form of regional government financial reports and audit reports. The study sample covers all provincial governments in Indonesia, using multiple linear regression analysis techniques. The results show that asset size has a significant positive effect on the level of financial report coverage, while regional wealth and the number of SKPD have a significant negative effect. Meanwhile, the level of dependence and the number of audit findings do not have a significant effect. This study has limita-*

### Acknowledgment

---

*tions in the use of limited variables and a relatively short research period. The implications of this study are expected to be a consideration for regional governments in improving transparency and accountability in financial management.*

**Key word:** *Disclosure Level, Regional Wealth, Asset Size, Dependency Level, Number of Regional Work Units (SKPD), Number of Audit Findings*

---

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak diterapkannya desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola keuangan. Desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi yang dimana dalam mengelola keuangan daerah. Konsekuensi dari kewenangan tersebut adalah dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan pemerintah provinsi menjadi instrumen utama dalam menunjukkan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Dalam persepektif *good governance*, pengungkapan laporan keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik (Arifin, 2020; Febriani & Harahap, 2021). Secara normatif, kewajiban penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta Permendagri Nomor 77 tahun 2020 yang mengharuskan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta mempublikasikannya secara terbuka. Namun demikian, meskipun regulasi yang berlaku bersifat seragam, pada praktiknya masih ditemukan variasi tingkat pengungkapan laporan keuangan antar pemerintah provinsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa implementasi transparansi belum berjalan secara optimal (Luthfi & Sari, 2023).

Fenomena empiris menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia masih relatif rendah dan belum merata. Data menunjukkan bahwa tingkat pelaporan hanya mencapai sekitar 50% pada tahun 2021, meningkat menjadi 58% pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 menjadi 63%, yang mengindikasikan bahwa masih banyak pemerintah provinsi yang belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Kondisi ini diperkuat oleh adanya penelitian sebelumnya yang menemukan rata-rata tingkat pengungkapan

masih berada pada kisaran 54% - 61% (Arifin, 2020; Luthfi & Sari, 2023). Rendahnya tingkat pengungkapan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan audit belum sepenuhnya mampu menjamin transparansi yang optimal. Dalam menjelaskan fenomena ini, berbagai penelitian terdahulu mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, di antaranya kekayaan daerah, ukuran aset, tingkat ketergantungan pemerintah, jumlah SKPD, dan jumlah temuan audit. Kekayaan daerah yang diprosikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dan diyakini dapat mendorong peningkatan transparansi (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Ukuran aset juga menjadi indikator penting karena semakin besar aset yang dimiliki, maka semakin tinggi tuntutan pengungkapan informasi kepada publik (Hardiningsih et al., 2022). Selain itu, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat menunjukkan sejauh mana daerah bergantung pada dana transfer yang berimplikasi pada meningkatnya tuntutan pengawasan dan akuntabilitas (Anggara & Cheisviyanny, 2020). Jumlah SKPD mencerminkan kompleksitas organisasi pemerintah daerah yang berpotensi meningkatkan kebutuhan akan transparansi informasi keuangan (Feriyantri et al., 2016). Sementara itu, jumlah temuan audit menjadi indikator kualitas pengelolaan keuangan dan efektivitas pengendalian internal (Pamungkas et al., 2019).

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* sebagai landasan teori yang memandang pemerintah sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publiknya demi kepentingan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menyampaikan informasi keuangan secara transparan dan akuntabel (Schillemans & Bjurström, 2020). Dengan demikian, tingkat pengungkapan laporan keuangan dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Berdasarkan uraian yang ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kekayaan daerah, ukuran aset, tingkat ketergantungan pemerintah, jumlah SKPD, dan jumlah temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia periode 2021-2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur terkait transparansi keuangan sektor publik serta memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas untuk menganalisis pengaruh kekayaan daerah, ukuran aset, tingkat ketergantungan, jumlah SKPD,

dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia periode 2021–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari situs resmi instansi pemerintah dan PPID. Data berbentuk panel (*time series dan cross section*) dari seluruh pemerintah provinsi di Indonesia, dengan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Variabel dependen diukur menggunakan indeks pengungkapan, sedangkan variabel independen diprosikan melalui PAD, total aset, rasio ketergantungan, jumlah SKPD, dan temuan audit. Analisis data menggunakan regresi linier berganda yang didahului dengan uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

## HASIL

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Disclosure	102	0,53	0,83	0,6659	0,7984
Wealth	102	26,64	31,65	28,6158	1,13865
Size	102	28,56	34,20	30,3800	0,97005
Depend	102	0,22	1,69	0,5434	0,18839
Skpd	102	18,00	121,00	41,1569	14,20901
Find	102	0,00	479,00	110,3627	145,41248

Sumber : Data diolah 2026

1. Laporan keuangan pemerintah provinsi (Y) periode 2021–2023 memiliki nilai minimum sebesar 0,53 dan maksimum sebesar 0,83, dengan rata-rata sebesar 0,6659, yang tergolong cukup baik namun masih perlu ditingkatkan.
2. Kekayaan daerah (X1) yang diprosikan melalui PAD (dalam log natural) memiliki nilai minimum 26,64 dan maksimum 31,65 dengan rata-rata 28,6158 dan standar deviasi 1,13865, yang menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah.
3. Ukuran aset sebagai variabel independen (X2) memiliki nilai minimum 28,56 dan maksimum 34,20 dengan rata-rata 30,3800 dan standar deviasi 0,97005, yang mencerminkan perbedaan skala ekonomi antar provinsi.
4. Tingkat ketergantungan sebagai variabel independen (X3) memiliki nilai minimum 0,22 dan maksimum 1,69 dengan rata-rata 0,5434 dan standar deviasi 0,18839, yang

menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer pusat dengan variasi yang relatif kecil.

5. Jumlah SKPD (X4) berkisar antara 18 hingga 121 dengan rata-rata 41,1569 dan standar deviasi 14,20901, yang menunjukkan adanya perbedaan kompleksitas organisasi antar daerah.
6. Jumlah temuan audit (X5) memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 479 dengan rata-rata 110,3627 dan standar deviasi 145,41248, yang mengindikasikan adanya variasi yang sangat tinggi dalam kualitas pengelolaan keuangan dan tingkat kepatuhan antar pemerintah provinsi.

### Uji Asumsi Klasik

#### Normalitas Data

**Tabel 2 Uji Normalitas**

	Unstandardized Residuals
N	102
Kolmogrov-Smirnov Z	0,63
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber : Data diolah 2026

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp. Sig sebesar  $0,200 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi normalitas.

#### Uji Multikolinieritas

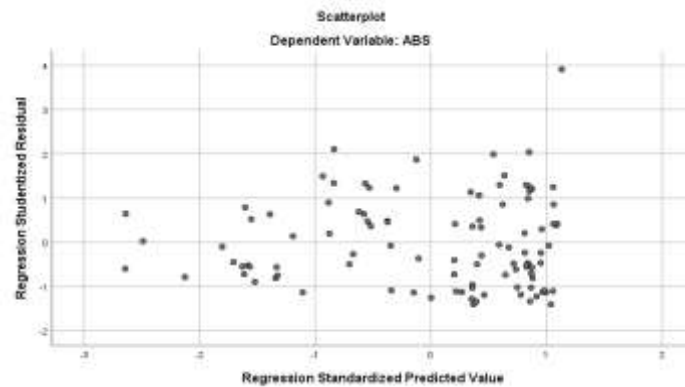
**Tabel 3 Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF
Kekayaan Daerah	0,228	4,387
Ukuran Aset	0,251	3,989
T. Ketergantungan	0,593	1,685
Jumlah SKPD	0,949	1,054
Jumlah Temuan	0,931	1,074

Sumber : Data diolah 2026

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai *Variance Inflation factor* (VIF)  $< 10$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas**

Sumber : Data diolah 2026

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scatter plot yang terlihat bahwa titik residual menyebar secara acak diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola khusus seperti bergerombol pada satu titik. Penyebaran titik yang acak menunjukkan bahwa varian residual bersifat konstan. Dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 4 Uji Autokorelasi (Run Test)**

	<b>Unstandardized Residual</b>
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,550

Sumber : Data diolah 2026

Hasil uji autokorelasi menggunakan Run Test menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,550 > 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala autokorelasi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

<b>Variabel</b>	<b>B</b>	<b>t</b>	<b>Sig</b>
<i>Constant</i>	0,747	2.423	0,017
Kekayaan Daerah	-0,050	-3,671	0,000
Ukuran Aset	0,048	3,111	0,002
T. Ketergantungan	-0,075	-1,465	0,146
Jumlah SKPD	-0,001	-2,150	0,034
Jumlah Temuan	-0,00002156	-0,406	0,686

Sumber : Data diolah 2026

Persamaan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai konstan ( $\alpha$ ) = 0,747 menunjukkan bahwa variabel bebas Kekayaan Daerah, Ukuran Aset, Tingkat Ketergantungan, Jumlah SKPD dan Jumlah Temuan Audit dianggap bernilai nol atau konstan, maka Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi adalah sebesar 0,747. Nilai konstanta ini mencerminkan tingkat pengungkapan dasar yang dapat dicapai tanpa dipengaruhi oleh kelima variabel independen yang diteliti.
2. Nilai koefisien regresi kekayaan daerah sebesar -0,050 bernilai negatif . Artinya, Setiap kenaikan 1 satuan kekayaan daerah, dengan asumsi variabel lain konstanta, akan menurunkan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan sebesar -0,050. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya kekayaan daerah cenderung kurang transparan dalam pengungkapan laporan keuangan karena adanya kompleksitas pengelolaan keuangan.
3. Nilai koefisien regresi ukuran aset sebesar 0,048 bernilai positif yang artinya setiap kenaikan 1 satuan ukuran aset, dengan asumsi variabel lain konstan, akan meningkatkan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan sebesar 0,048. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran aset pemerintah provinsi, maka kecenderungan untuk mengungkapkan informasi laporan keuangan secara lebih luas juga semakin tinggi.
4. Nilai koefisien regresi tingkat ketergantungan sebesar -0,075 bernilai negatif. Artinya setiap peningkatan 1 satuan tingkat ketergantungan, dengan asumsi variabel lain konstan, akan menurunkan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan sebesar -0,075. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer atau dana perimbangan, maka tingkat pengungkapan laporan keuangan cenderung menurun.
5. Nilai koefisien regresi jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar -0,001 bernilai negatif. Artinya, setiap penambahan 1 satuan kerja perangkat daerah, dengan asumsi variabel lain konstan, akan menurunkan tingkat pengungkapan laporan keuangan sebesar -0,001. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah SKPD, maka semakin kompleks proses penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat menurunkan tingkat pengungkapan informasi.
6. Nilai koefisien regresi jumlah temuan audit sebesar -0,00002156 bernilai negatif yang dimana setiap peningkatan 1 temuan audit, dengan asumsi variabel lain konstan maka akan menurunkan tingkat pengungkapan laporan keuangan sebesar -0,00002156, yang mencerminkan perbedaan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

**Pengujian Hipotesis****Uji Koefisien Determinasi****Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi**

<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>
0,405	0,164	0,121

Sumber : Data diolah 2026

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diketahui bahwa Adjusted R Square sebesar 0,121 atau 12,1% yang dimana variabel dependen dapat mendiskripsikan 12,1% melalui variabel independen. Sedangkan sisanya sebanyak 87,9% di jelaskan oleh variabel independen yang lain.

**Uji Statistik F****Tabel 7 Uji Statistik F**

<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>Sig</b>
1	3,772	0,004

Sumber: Data diolah 2026

Merujuk pada output pengujian diatas bahwa nilai sig yaitu 0,004 atau lebih rendah daripada 0,05 maka bisa ditarik kesimpulan variabel independen memiliki dampak pengaruh signifikan pada variabel dependen tingkat pengungkapan laporan keuangan.

**Uji Statistik T****Tabel 8 Uji Statistik T**

<b>Variabel</b>	<b>T</b>	<b>Sig</b>
Kekayaan Daerah	-3,671	0,000
Ukuran Aset	3,111	0,002
T.Ketergantungan	-1,465	0,146
Jumlah SKPD	-2,150	0,034
Jumlah Temuan	-0,406	0,686

Sumber : Data diolah 2026

Berdasarkan hasil uji statistik t diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel kekayaan daerah memiliki t statistik yaitu -3,671 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih rendah 0,05 yang mengartikan bahwa variabel kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak.

2. Variabel ukuran aset daerah memiliki t statistik yaitu 3,111 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 atau lebih rendah 0,05 yang mengartikan bahwa variabel ukuran aset berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.
3. Variabel tingkat ketergantungan daerah memiliki t statistik yaitu -1,465 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,146 atau lebih tinggi 0,05 yang mengartikan bahwa variabel tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.
4. Variabel jumlah SKPD daerah memiliki t statistik yaitu -2,150 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034 atau lebih rendah 0,05 yang mengartikan bahwa variabel jumlah SKPD berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak.
5. Variabel jumlah temuan daerah memiliki t statistik yaitu -0,406 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,686 atau lebih tinggi 0,05 yang mengartikan bahwa variabel jumlah temuan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia periode 2021–2023 masih tergolong cukup baik namun belum optimal. Hasil analisis mengindikasikan bahwa ukuran aset berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan, sedangkan kekayaan daerah dan jumlah SKPD berpengaruh negatif signifikan, sementara tingkat ketergantungan dan jumlah temuan audit tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan, khususnya pada daerah dengan tingkat kekayaan dan kompleksitas organisasi yang tinggi, serta memperkuat koordinasi antar SKPD. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain dan memperluas periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 1275-1288. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.278>

- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Ketegangan Politik Timur Tengah 2025 pada Saham Energi di Indonesia. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 239-247. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.111>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Perbandingan Abnormal return, Return saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Buyback Saham. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(2), 100-109. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i2.49>
- Amin, M. A. N. (2018). Analisis Perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buyback Stock). *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1), 85-99. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.42>
- Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2162–2184. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.205>
- Arifin, J. (2020). Domination of Regional Wealth as a Determining Factor of Financial Statement Disclosure. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 91–104. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.91-104>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of managemen. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Febriani, U., & Harahap, J. P. J. (2021). Analisis Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Regress: Journal of Economics & Management*, 1(1), 9–17. <https://doi.org/10.57251/reg.v1i1.127>
- Feriyanti, M., Hermanto, H., & Suransi, N. K. (2016). Determinan Kepatuhan Pada Ketentuan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat). *InFestasi*, 11(2), 171. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1130>
- Hardiningsih, P., Pramudibyanto, H., Kristiana, I., & Suhadi, S. (2022). Disclosure Determinants of Provincial Financial Statements. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 20(1), 50–64. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v20i1.6631>
- Luthfi, M., & Sari, V. F. (2023). Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 771–787. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.753>
- Pamungkas, B., Avrian, C., & Ibtida, R. (2019). Factors influencing audit findings of the Indonesian district governments' financial statements. *Cogent Business and Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1673102>
- Schillemans, T., & Bjurstrøm, K. H. (2020). Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650–676. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>